PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Periode 2013-2015)

THE EFFECTS NUMBER OF TAXPAYERS AND DISBURSEMENT OF TAX ARREARS AGAINST THE PERSONAL INCOME TAX REVENUE

(Case Study of Tax Office Pratama Cimahi Periode 2013-2015)

Oleh:
Ressa Mannaki
21112263
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universtas Komputer Indonesia Bandung

ABSTRACT

This study is based on the phenomenon, that occurs in number of Tax Payers is many individual taxpayers who do not pay their tax obligations. In addition, many individual taxpayers who did not report letter of notification which causes the personal income tax receipts have not reached the target. Next on the disbursement of tax arrears the many number disbursement of tax arrears have not been paid by individual taxpayers so that the personal income tax revenue remains low.

The purpose of this study was to determine the effects number of taxpayers and disbursement of tax arrears against the personal income tax revenue on tax Office Pratama Cimahi. In this research using descriptive and verificative method with quantitative approach. The test statistic used is multiple linear regression analysis, correlation analysis, analysis of determinant coefficient, hypothesis test (t test).

The results of this study indicate The Effects Number of Taxpayers against The Personal Income Tax Revenue thus on Disbursement of Tax Arrears against The Personal Income Tax Revenue.

Key words: *Number of Taxpayers, Disbursement of Tax Arrears and The Personal Income Tax Revenue*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara yang berkembang adalah negara yang terus-menerus melakukan pembangunan nasional, sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia juga berupaya melakukan pembangunan nasional semaksimal mungkin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Pembangunan dapat dilakukan bila dana yang diperlukan memadai dan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak (Waluyo, 2011: 2).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan yang potensial untuk negara dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dikatakan sebagai penerimaan yang potensial untuk negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Rimsky K. Judisenno, 2005:4)

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik seperti jalan raya, halte, penerangan umum dan sebagainya. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia (Aisyah, 2013: 1).

Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya Jumlah Wajib Pajak khususnya orang pribadi yang melaporkan SPT masa atau tahunannya, tentunya akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Mardiasmo, 2011: 7).

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar setiap bulannya selalu bertambah, namun kenyataan yang terjadi pada KPP Pratama Cimahi adalah belum dibarengi dengan pelaporan spt oleh wajib pajak orang pribadi. Karena tidak mau membayar kewajiban perpajakannya dan tidak melaporkan sptnya sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi belum mencapai target (Arifin, 2016).

Selanjutnya, Pencairan tunggakan pajak sendiri merupakan jumlah pembayaran atas sejumlah tunggakan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi jika tunggakan pajak tersebut dapat dicairkan oleh wajib pajak orang pribadi ke kantor pajak (Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas 2013: 64). Semakin besar pencairan tunggakan pajak, semakin besar pula penerimaan pajak (Fitriani, 2009: 139). Peningkatan pencairan tunggakan pajak secara umum dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Waluyo, 2010: 238).

Jumlah pencairan tunggakan pajak seharusnya meningkat tiap bulannya. Namun yang terjadi pada KPP Pratama Cimahi, banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi yang belum melunasi tunggakan pajaknya sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih rendah (Kunkun, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang pribadi Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi periode 2013-2015".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Seberapa besar pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapat kebenaran mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Untuk mendapatkan hasil kajian seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mendapatkan kajian seberapa besar pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak perusahaan terkait dan pemecahan masalah mengenai adanya Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan Akademis adalah untuk pengembangan keilmuan, dimana penelitian ini dapat berguna sebagi berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Sebagai sarana pengaplikasian teori sehingga berguna bagi pihak akademis lain yang memerlukan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2011: 75), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah

"Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu dan melaporkan surat pemberitahuan masa atau tahunan ke kantor pajak."

Berikutnya dari Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 29) mengatakan bahwa:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang wajib melaporkan surat pemberitahuan masa atau tahunan."

Hal senada dikatakan oleh Mardiasmo (2011: 137) bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dengan kewajiban melaporkan surat pemberitahuan baik masa ataupun tahunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu yang melaporkan pajaknya menggunakan surat pemberitahuan masa atau tahunan.

2.1.1.1 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Menurut Fajar Budiman & Nia Anggrie Pratiwi (2010:13) bahwa indikator dari Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan masa atau tahunan. Berikutnya, Atep Adya Barata (2011:539) mengatakan bahwa indikator dari Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya menggunakan surat pemberitahuan masa atau tahunan. Selanjutnya, dikatakan juga oleh Erly Suandy (2008:89) bahwa yang menjadi pengukur atau indikator dari Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT masa atau tahunannya.

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil indikator dari Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT masa atau tahunannya.

2.1.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Mariusz Poplawski (2011: 78) pengertian Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran sejumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan dibayar dalam batas waktu pembayaran. Berikutnya yang dikatakan oleh Siti Resmi (2013: 40) pengertian Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak. Hal senada dikatakan oleh Yustinus Prastowo (2009: 164) bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran besar jumlahnya tunggakan pajak yang dicairkan masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak.

Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa pengertian Pencairan Tunggakan Pajak di atas tersebut yaitu jumlah utang tunggakan pajak yang harus dibayarkan sejak dikeluarkannya surat ketetapan pajak, yang digunakan untuk pelunasan utang pajak.

2.1.2.1 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011: 283) indikator dari Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak. Berikutnya, menurut Gatot S.M.Faisal (2009: 414) indikator pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak, serta menurut Diaz Priantara (2012: 135) indikator dari pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak.

Dari beberapa indikator yang disebutkan di atas, penulis mengambil indikator dari Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak.

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Paparan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:168) bahwa pengertian dari Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah

"Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi dengan ditambahkan naik turunnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya itu sendiri."

Hal yang senada dikemukakan oleh Siti Resmi (2011:74) bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak yang dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya itu sendiri. Berikutnya, menurut Waluyo (2011:99) Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu:

"pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya itu sendiri."

Jadi, beberapa paparan di atas bahwa pengertian dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah penerimaan pajak dalam negeri yang dikenakan pada subjek pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.1.3.1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Liberti Pandiangan (2010: 11) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu indikator dari Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berikutnya, menurut Uwon Gustiawan S. (2007: 13) indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, serta yang diungkapkan oleh Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010: 1) indikator dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dari paparan di atas, maka penulis mengambil indikator dari Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya Jumlah Wajib Pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2011: 7). Dengan meningkatnya Jumlah Wajib Pajak, maka penerimaan pajak penghasilan pun akan meningkat (Ai Nur Bayinah, 2015: 118).

Apabila Jumlah Wajib Pajak terus meningkat dan langkah ini dilakukan dengan efisien maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pun akan optimal (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012: 28) serta penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami kenaikan jika Jumlah Wajib Pajak meningkat (Sugiyono, 2013: 134).

2.2.2 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pencairan tunggakan pajak sendiri merupakan jumlah pembayaran atas sejumlah tunggakan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi jika tunggakan pajak tersebut dapat dicairkan oleh wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuannya ke kantor pajak (Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas 2013: 64).

Semakin besar pencairan tunggakan pajak, semakin besar pula penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Fitriani, 2009: 139). Peningkatan pencairan tunggakan pajak secara umum dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Waluyo, 2010: 238).

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, bahwa:

H_1: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H_2: Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Menurut Ulber Silalahi (2012: 12) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.2 Opersionalisasi Variabel

Andi Supangat (2010: 9) menjelaskan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

"Operasionalisasi variabel melakukan identifikasi variabel, ada berapa banyak variabel yang digunakan dalam penelitian yang direncanakan, menggunakan skala apa saja dalam setiap variabelnya dan termasuk melakukan pemisahan variabel mana yang akan dijadikan sebagai variabel tidak bebas dan variabel mana yang dijadikan sebagai variabel bebasnya, jika digunakan lebih dari satu variabel dalam sisi pengamatannya".

Sebelum mengadakan penelitian diperlukan operasional variabel untuk menentukan jenis indikator yang terkait dalam penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara benar. Maka terdapat variabel yang diteliti yaitu:

1. Variabel independent (X) atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable dependent (terikat). Data yang menjadi variabel bebas (variabel X) adalah pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Data yang menjadi variabel terikat (variabel Y) adalah Penerimaan Pajak Peenghasilan Orang Pribadi.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Toni Wijaya (2013:19) data sekunder adalah:

"Data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap dipakai".

Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Jonathan Sarwono (2006:26) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

   studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis, seperti studi kepustakaan melalui jurnal, *textbook*, karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi *(Documentation Research)*

   Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi bagian Pengolaha Data dan Informasi serta Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi periode tahun 2013-2015 guna memperoleh data-data yang diperlukan.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Andi Supangat (2010: 3) populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan Sugiyono (2011: 117) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah data laporan Jumlah Wajib Pajak berupa jumlah WPOP lapor SPT, data laporan jumlah pencairan tunggakan pajak dan data realisasi penerimaan PPhOP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada dimulainya Reformasi Pajak tahun 1983 sampai 2015.

3.4.2 Penarikan Sampel

Andi Supangat, (2010: 4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampel yaitu bagian dari populasi (contoh) untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili *(representative)* terhadap populasinya. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.

Adapun Sugiyono (2013: 84) menjelaskan bahwa sampel jenuh adalah:

*"*Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Menurut (Arifin, 2016) bagian PDI memaparkan, di karenakan KPP Pratama Cimahi berdiri sejak tahun 2006 dan kemudian data laporan pajak dari tahun 2006 sampai tahun 2012 dihapuskan. Maka data yang didapatkan dan yang menjadi sampel pada KPP Pratama Cimahi adalah pada periode 2013-2015.

Data yang diberikan sebagai berikut:

1. Laporan jumlah wajib pajak orang pribadi lapor SPT di KPP Pratama Cimahi setiap bulannya tahun 2013-2015.
2. Laporan jumlah pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Cimahi setiap bulannya tahun 2013-2015.
3. Laporan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Cimahi setiap bulannya tahun 2013-2015.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel yang di dapat dari KPP Pratama Cimahi setiap bulannya periode 2013-2015.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sugiyono (2011: 277) menyatakan bahwa analisis regresi liniear berganda adalah:

"Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)".

Menurut Imam Ghozali, (2011:57) uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari normalitas multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, sebagai berikut:

1. Uji Normalitas
   Digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.
2. Uji Multikolinieritas
   Digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
3. Uji Hateroskedastisitas
   Digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

4. Uji Autokorelasi
   Digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negative antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

Alat pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Linier Berganda
   Digunakan untuk meramalkan bagaimnana keadaan (naik/turunya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai indicator.
2. Analisis Korelasi
   Bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.
3. Koefisien Determinasi
   Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y yang dinyatakan dalam presentase.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Korelasi

Koefisien korelasi berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara Jumlah WPOP dan Pencairan Pajak dengan Penerimaan PPhOP.

a. Korelasi antara Ekstensifikasi Pajak dengan Penerimaan PPhOP
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pphop termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak yang melaporkan spt, maka realisasi penerimaan pphop akan semakin tinggi.

b. Korelasi antara Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan PPhOP
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pphop termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa semakin besar jumlah pencairan tunggakan pajak, maka realisasi penerimaan pphop akan semakin tinggi.

4.1.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini merupakan nilai yang menunjukan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan ekstensifikasi pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian data diperoleh bahwa jumlah wajib pajak memiliki kontribusi yang cukup terhadap penerimaan pphop sedangkan pencairan tunggakan pajak memiliki kontribusi rendah tetapi pasti terhadap penerimaan pphop.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPhOP Pada KPP Pratama Cimahi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara Jumlah Wajib Pajak dengan Penerimaan PPhOP pada KPP Pratama Cimahi terdapat hubungan yang cukup kuat yang artinya semakin banyak Jumlah WPOP yang Lapor SPT maka akan akan diikuti pula oleh semakin tingginya Realisasi Penerimaan PPhOP.

Kemudian pada tingkat koefisien determinasi pada Jumlah Wajib Pajak memberikan kontribusi pengaruh terhadap Penerimaan PPhOP cukup besar yang menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak yang baik akan menghasilkan Penerimaan PPhOP sesuai target.

Hal ini membuktikan bahwa fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Cimahi menunjukkan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dan tidak melaporkan surat pemberitahuannya yang menyebabkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi belum mencapai target (Arifin, 2016).

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu dan melaporkan surat pemberitahuan masa atau tahunan ke kantor pajak (Siti Resmi, 2011: 75). Apabila Jumlah Wajib Pajak terus meningkat dan langkah ini dilakukan dengan adanya penyuluhan oleh bagian pelayanan di kantor pajak maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pun akan optimal (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012: 28).

Hasil penelitian juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Widya Febri Hadiyanti (2014) tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.2.2 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan PPhOP Pada KPP Pratama Cimahi

Berdasarkan hasil penelitian pada koefisien korelasi antara Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan PPhOP pada KPP Pratama Cimahi termasuk kategori hubungan yang cukup kuat yang artinya semakin banyak jumlah pencairan tunggakan pajak maka akan akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan PPhOP.

Kemudian pada tingkat koefisien determinasi pada pencairan tunggakan pajak memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi cukup rendah tapi pasti yang menunjukkan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak yang baik akan menghasilkan Penerimaan PPhOP sesuai target.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi fenomena pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi banyaknya jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi sehingga Penerimaan PPhOP masih rendah setiap bulannya.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran sejumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan dibayar dalam batas waktu pembayaran (Mariusz Poplawski, 2011: 78). Oleh karena itu, peningkatan pencairan tunggakan pajak secara umum dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Waluyo, 2010: 238).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ninis Gusti Wulandari (2015) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis dan hasil analisis data mengenai pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian pada koefisien determinasi menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPhOP pada KPP Pratama Cimahi. Hubungan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPhOP berada pada interval koefisien korelasi atau hubungan yang cukup kuat dan berdasarkan hasil pengujian didapatkan semakin baik Jumlah Wajib Pajak akan meningkatkan Penerimaan PPhOP.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada koefisien determinasi menunjukkan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPhOP pada KPP Pratama Cimahi. Hubungan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan PPhOP berapa pada interval koefisien korelasi atau hubungan yang cukup kuat dan berdasarkan hasil pengujian didapatkan semakin baik Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkatkan Penerimaan PPhOP.

5.1 Saran

5.1.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Masalah Jumlah Wajib Pajak terjadi karena banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dan tidak melaporkan surat pemberitahuannya. Maka dari itu bagian Pelayanan harus melakukan penyuluhan tentang tata cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta memberikan motivasi kepada wajib pajak agar mau membayar pajak.
2. Masalah Pencairan Tunggakan Pajak terjadi karena banyaknya jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu bagian Penagihan harus melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan terkait pencairan tunggakan pajak seperti dengan melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan berupa pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, surat teguran, surat paksa, dan sanksi pajak.

5.1.2 Saran Teknis

Disarankan agar peneliti berikutnya dapat lebih memberikan bukti yang empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak. Selain itu peneliti yang berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis yang berbeda serta populasi dan sampel yang berbeda agar memperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ai Nur Bayinah. 2015. *Bayar Pajak Lebih Murah*. Jakarta: Visimedia Pustaka

Aisyah. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajk Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Periode 2009-2012*. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).*

Andi Supangat. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parametrik.* Jakarta: Kencana Prenada.

Atep Adya Barata. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan.* Jakarta: Visimedia.

Diaz Priantara*.* 2012. *Perpajakan Indonesia edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Erly Suandy. 2011. *Edisi 5 Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pratiwi. 2010. *79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya.* Jakarta: Raih Asa Sukses

Fitriani. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu), Journal Of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 2, 135-149.*

Gatot S.M. Faisal. 2009. *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak.* Jakarta: Grasindo.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto . 2011. *Panduan Lengkap: Panduan Lengkap, Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta:Transmedia Pustaka.

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima).* Semarang: Universitas Diponegoro.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Liberti Pandiangan. 2010. *Hindari Kesalahan Pajak: Rakyat Senang Jika Anda Patuhi 37 Larangan Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* . Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ninis Gusti Wulandari. 2015. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.* Universitas Kanjuruhan Malang.

Poplawski, Mariusz. 2011. *Białystok Law Books 3 Introduction To Polish Tax Law.* Poland: Wydawnictwo Temida 2

Rimsky K. Judisseno. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi*. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan.* Yogyakarta: CV.Andi.

Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya).

Tony Wijaya. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Graha Ilmu: Yogyakarta.

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Uwon S. Gustiawan. 2007. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP).* Jakarta: PT.Grasindo.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo*. 2010. Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widya F. Hadiyanti. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.* Universitas Widyatama.

Yustinus Prastowo. 2009. *Panduan Lengkap Pajak.* Jakarta: Raih Asa Sukses.